



DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

TAHUN 2018

NO :.....

TANGGAL :.....

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan	1
2. Sekilas tentang SPIP.....	2
3. Lingkungan Pengendalian	5
4. Penilaian Risiko	7
5. Aktivitas Pengendalian	8
6. Informasi dan Komunikasi	18
7. Monitoring dan Evaluasi	19
8. Lampiran 1 Daftar Identifikasi Risiko	
9. Lampiran 2 Daftar Analisis Risiko	
10. Lampiran 3 Desain Pengendalian Risiko	
11. Lampiran 4 Contoh Kriteria Skala Dampak	
12. Lampiran 5 Contoh Kriteria Skala Keterjadian	

KATA PENGANTAR

Semangat untuk membangun Kota Medan, khususnya dalam menciptakan pengelolaan keuangan dan aset yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tentunya tidaklah begitu sederhana sehingga diperlukan suatu manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik. Dalam rangka mewujudkan manajemen penyelenggaraan Pemerintah daerah yang baik diperlukan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk mencegah kegagalan dan mempercepat keberhasilan dari capaian kinerja yang diharapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah instrumen yang tepat untuk mendukung kinerja manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan penetapan SPIP untuk diberlakukan diseluruh Indonesia, maka untuk Pemerintah Kota Medan telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Dinas Kesehatan Kota Medan dalam penerapan SPIP perlu membuat dokumen Rencana Tindak Pengendalian untuk digunakan sebagai alat untuk kegiatan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan.

Rencana Tindak Pengendalian ini akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan serta akan dilakukan pemantauan secara berkala tiga bulan sekali. Diharapkan agar seluruh pejabat dan pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan menyelenggarakan penerapan SPIP dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MEDAN,

Drg. Hj. USMA POLITA NASUTION, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19611003 198903 2 002

U R A I A N

1. Pendahuluan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Untuk menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Dalam mengemban amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di lingkungan Pemerintah Kota Medan, khususnya Dinas Kesehatan Kota Medan.

A. Latar Belakang

Dinas Kesehatan Kota Medan sebagai instansi Pemerintah Daerah tentunya wajib untuk menyelenggarakan kebijakan SPIP tersebut diatas. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan SPIP tersebut maka diperlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian guna menjadi acuan bagi para penyelenggara tugas pokok di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai disain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Kesehatan Kota Medan sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam penetapan kinerja.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Kota Medan.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai dilingkungan

Dinas Kesehatan Kota Medan untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

RTP saat ini diprioritaskan pada kegiatan – kegiatan untuk pencapaian visi-misi Dinas Kesehatan dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Medan .

D. Manfaat

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari.
2. Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP
3. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP.
4. Sebagai bahan penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR)

E. Ruang Lingkup

Dari sisi tujuan organisasi, yang akan dijamin adalah tujuan yang terkait dengan tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan, tujuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, harapan yang dituntut oleh stakeholder, dan hal-hal lain yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Medan.

Sedangkan dari tahap manajemen, maka Rencana Tindak Pengendalian Intern ini meliputi tahapan manajemen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran, pelaporan pelaksanaan, pemantauan pelaksanaan anggaran baik keuangan maupun aset.

2. Sekilas tentang SPIP

A. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai *proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,*

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Definisi SPI dan SPIP diatas dipahami oleh Dinas Kesehatan Kota Medan sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan (*on going basis*) guna mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut harus dapat dicapai dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara yang diamanahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Medan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang lebih handal, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian jaminan berupa keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan sebaiknya dapat diberikan sejak tahap manajemen perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan pelaksanaan anggaran, pelaporan pelaksanaan anggaran dan pemantauan.

C. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Pemantauan Berkelanjutan.

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan pembangunan kelima unsur tersebut pada Dinas Kesehatan Kota Medan adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

Pengawasan atasan dan budaya pengendalian diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja Dinas Kesehatan Kota Medan.

2. Penilaian Risiko

Identifikasi dan analisis risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Medan.

Berbagai gaya kepemimpinan dan sudut pandang pemikiran akan mempengaruhi penetapan dan penilaian risiko yang dihadapi sehingga memungkinkan akan menjadi faktor kendala dalam pelaksanaannya.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Kesehatan Kota Medan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Kesehatan Kota Medan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian :

- 1) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 2) Ditetapkan secara tertulis;
- 3) Dilaksanakan dengan pengawasan dari Petugas Penegak Disiplin; dan
- 4) Dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

1) Informasi

Informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai Sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengantanggjawabnya masing-masing.

Dinas Kesehatan Kota Medan harus menyelenggarakan Sistem Informasi supaya dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dinas Kesehatan Kota Medan sekurang-kurangnya memiliki dan memelihara sistem informasi manajemen yang diselenggarakan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik. Mengingat bahwa sistem informasi elektronik dan penggunaan teknologi informasi tersebut mempunyai dampak risiko maka Dinas Kesehatan Kota Medan harus mengendalikan nya secara efektif guna menghindari adanya gangguan usaha dan kemungkinan timbulnya kerugian Dinas Kesehatan Kota Medan yang signifikan.

2) Komunikasi

Sistem komunikasi pada Dinas Kesehatan Kota Medan harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Dinas Kesehatan Kota Medan memastikan bahwa penggunaan sistem komunikasi yang diberlakukan di Dinas Kesehatan Kota Medan telah diselenggarakan.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Medan harus memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, kebawah dan lintas satuan kerja/unit :

- 1) informasi keatas untuk memastikan bahwa Pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Kesehatan KotaMedan. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- 2) informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Kesehatan Kota Medan serta kebijakan Dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan bawah dan para pelaksana.
- 3) informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

3. Lingkungan Pengendalian

A. Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

Pengawasan atasan dan budaya pengendalian diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia dan metode kerja Dinas Kesehatan Kota Medan. Untuk itu, seluruh jajaran baik Pimpinan maupun staf Dinas Kesehatan Kota Medan diharapkan dapat menjunjung integritas dan nilai-nilai etika dalam pencapaian tujuan organisasi.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Kesehatan Kota Medan masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika, Komitmen terhadap Kompetensi, Kepemimpinan yang Kondusif, dan Kebijakan Pengembangan SDM, sebagaiberikut :

- 1) Pada sub unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika, Dinas kesehatan berpedoman pada kode etik yang disusun oleh Pemerintah Kota Medan yaitu Peraturan Walikota Medan no 2 Tahun 2012 yang diberlakukan bagi seluruh pegawai baik itu pimpinan ataupun staf di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan ;
- 2) Pada sub unsur Komitmen terhadap Kompetensi, Dinas Kesehatan Kota Medan sudah melaksanakan identifikasi terhadap kompetensi pimpinan dan pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan dimana telah disusun Analisis Jabatan (Anjab) bagi ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan namun dalam implementasinya belum semua dapat direalisasikan ;
- 3) Pada sub unsur Kebijakan pengembangan SDM, Dinas Kesehatan sebagian besar mengandalkan pelatihan yang diadakan oleh BKD karena untuk melakukan pengembangan SDM di lingkungan Dinas Kesehatan hanya sedikit yang dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran ;
- 4) Pada sub unsur peran APIP yang efektif, Dinas Kesehatan Kota Medan belum memadai dalam melaksanakan reviu secara periodik baik terkait dengan efisiensi, keuangan, pengendalian

internal dan reviu terhadap ketaataan terhadap peraturan perundangan.

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (Control Environment Evaluation), terdapat kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

No.	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Ketersediaan obat yang ada belum optimal optimal	Kasie Farmasi	Tahun 2018
2	Tempat penyimpanan obat yang belum memadai	Kasie Farmasi	Tahun 2019
3	Banyaknya obat serta makanan dan minuman produk kemasan yang tidak memiliki izin edar resmi	Kasie Farmasi	Tahun 2018
4	Tidak terpenuhinya standar peralatan kesehatan di Puskesmas	Kasi Alkes dan PKRT	Tahun 2018
5	Tidak semua alat kesehatan terkalibrasi setiap tahun	Kasi Alkes dan PKRT	Tahun 2018
6	Kurangnya Diklat SDM/ Penanggungjawab program surveilans	Kasi Surveilans , Immunisasi dan Haji	Tahun 2019
7	Setelah diberikan PMT 90 hari tidak berkelanjutan pemberian makanan tambahan di keluarga	Kasi Kesga dan Gizi	Tahun 2019
8	Terbatasnya jumlah mikroskop yang baik dan bahan habis pakai diluar dropping dari pusat pada setiap	Kasi P2PM	Tahun 2019
9	Penderita sering menghentikan sendiri pengobatan sebelum waktunya berhenti	Kasi P2PM	Tahun 2019
10	Kondisi Jumlah kepesertaan JKN PBI yang berubah-ubah setiap bulan (tidak tetap)	Kasi yankes Primer	Tahun 2019
11	Syarat pengajuan klaim dari RS provider sering tidak lengkap	Kasi yankes Primer	Tahun 2019
12	Jumlah kapitasi di Puskesmas yang tidak tetap	Kasi yankes Primer	Tahun 2019
13	Keterbatasan Pagu anggaran daerah	Kasi yankes Primer	Tahun 2018

4. Penilaian Resiko

Dalam rangka penilaian risiko, tujuan strategis Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2018 diprioritaskan pada kegiatan – kegiatan untuk pencapaian visi-misi Dinas Kesehatan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan. Dalam rangka pencapaian tujuan strategis organisasi Tahun 2018 tersebut, telah dilakukan identifikasi atas risiko-risiko dan permasalahan-permasalahan yang akan mengganggu kegiatan untuk pencapaian visi-misi Dinas Kesehatan dalam rangka mendukung misi dan visi Pemerintah Kota Medan. Rincian lebih lanjut terkait Daftar Identifikasi Risiko lihat **Lampiran 1**.

Terhadap risiko-risiko pada daftar risiko tersebut telah dilakukan analisis atas kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak pada tercapainya tujuan organisasi.

Untuk melakukan analisis risiko tersebut, sebelumnya ditetapkan dahulu skala kemungkinan dan skala dampak yang digunakan untuk mengukur tingkat ancaman terhadap pencapaian tujuan strategis.

Skala kemungkinan yang ditetapkan menggunakan skala 5 dengan uraian sebagai berikut :

Skor	Derajat (Degree)	Kemungkinan (Likelihood)
1	Sangat jarang	Mungkin terjadi sekali dalam lebih dari 5 tahun
2	Jarang	Mungkin terjadi setiap 1 hingga 5 tahun
3	Sering	Mungkin terjadi setiap 1 hingga 6 bulan
4	Sangat sering	Mungkin terjadi setidaknya setiap minggu/bulan

Skala dampak yang ditetapkan menggunakan skala 5 dengan uraian sebagai berikut :

Skor	Derajat (tingkat)	Dampak Keuangan	Tuntutan Ganti Rugi	Dampak pada kesehatan dan keselamatan	Dampak pada pihak terkait
1	Sangat rendah	< 3% anggaran	Tuntutan sebesar Rp 100.000 – Rp 1.000.000	Luka kecil pada orang atau beberapa orang	Hanya berdampak pada satu pihak
2	Rendah	3-8% anggaran	Tuntutan sebesar Rp 1.000.000 – Rp 5.000.000	Luka berarti pada orang atau beberapa orang	Berdampak pada 2-3 pihak

3	tinggi	8-12% anggaran	Tuntutan sebesar Rp 5.000.000 – Rp 25.000.000	Luka serius pada orang atau beberapa orang	Berdampak pada 4- 5 pihak
4	Sangat tinggi	> 12% anggaran	Tuntutan sebesar > Rp 25.000.000	Luka berganda atau kematian	Berdampak pada lebih dari 5 pihak

Setelah dilakukanan alisis risiko menggunakan skala kemungkinan dan skala dampak tersebut diatas, diperoleh daftar Analisis Risiko lihat Lampiran 2.

Pada pelaksanaannya, tidak seluruh risiko akan ditangani oleh Dinas Kesehatan Kota Medan dalam Tahun 2018-2019. Risiko-risiko yang akan ditangani adalah risiko-risiko yang sangat ektrim, risiko-risiko yang tinggi, risiko-risiko yang menengah dan rendah sesuai dengan skala prioritas organisasi.

Risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan di analisis akan ditangani dengan kegiatan pengendalian pada masing-masing organisasi, sebagaimana Lampiran 3.

5. Aktivitas Pengendalian

Akitifitas pengendalian yang akan dilaksanakan dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya akan diuraikan sebagaimana berikut. Kegiatan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan terkait dengan risiko-risiko yang berdampak dalam pencapaian tujuan sebagaimana tercantum dalam visi Dinas Kesehatan Kota Medan “ Menjadi Kota yang sehat dalam kemandirian dan humanis ”.

1. Ketersediaan obat yang ada belum optimal

- a. Pengendalian yang sudah ada.
Anggaran pengadaan obat dan BMHP
- b. Efektifitas Pengendalian yang ada
Efektif
- c. Pengendalian yang masih dibutuhkan
Pengendalian yang masih dibutuhkan terkait dengan resiko tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :
 - 1) Mengusulkan anggaran pengadaan obat sesuai kebutuhan
 - 2) Bimtek perencanaan obat terhadap petugas obat
 - 3) Perencanaan obat sesuai kebutuhan
 - 4) Pembuatan aplikasi e logistik obat
- d. Rencana Perbaikan

Terkait pengendalian yang masih dibutuhkan maka Dinas Kesehatan Kota Medan dalam tahun 2018 akan melaksanakan perbaikan sebagai berikut : merencanakan kegiatan bimtek perencanaan obat bagi petugas farmasi di Puskesmas dan pembuatan aplikasi e-logistik obat serta membuat membuat usulan anggaran kebutuhan obat yang disesuaikan dengan kebutuhan.

No	Kegiatan Pengendalian	Penanggung-jawab	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Mengusulkan anggaran pengadaan obat sesuai kebutuhan	Kasi Farmasi	Tahun 2018	DPA
2	Bimtek perencanaan obat terhadap petugas obat	Kasi Farmasi	Tahun 2019	Peningkatan pengetahuan petugas obat
3	Perencanaan obat sesuai kebutuhan	Kasi Farmasi	Tahun 2018	RKA
4	Pembuatan aplikasi e logistik obat	Kasi Farmasi	Tahun 2019	Aplikasi e-logistik obat

2. Tempat Penyimpanan Obat Belum Memadai

- a. Pengendalian yang sudah ada
 - 1) Belum ada
- b. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Terkait dengan risiko tersebut di atas, maka Dinas Kesehatan Kota Medan masih membutuhkan beberapa pengendalian terkait dengan tindak lanjut yaitu:

 - 1) Perencanaan pembangunan Instalasi Farmasi yang standar
 - 2) Mengusulkan angaran prasarana Instalasi Farmasi
 - 3) Mengusulkan anggaran pemeliharaan prasarana Instalasi farmasi
- c. Rencana Perbaikan

Terkait pengendalian yang masih dibutuhkan berkenaan dengan penyimpanan obat maka Dinas Kesehatan Kota Medan dalam Tahun 2018 merencanakan untuk melaksanakan perbaikan atas kegiatan pengendalian tersebut, yaitu:

No	Kegiatan Pengendalian	Penanggung-jawab	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Perencanaan pembangunan Instalasi Farmasi yang standar	Kasi Farmasi	Tahun 2018	Dokumen usulan pembangunan instalasi farmasi yang standar
2.	Mengusulkan anggaran prasarana Instalasi Farmasi	Kasi Farmasi	Tahun 2018	DPA
3.	Mengusulkan anggaran pemeliharaan prasarana Instalasi farmasi	Kasi Farmasi	Tahun 2018	DPA

3. Banyaknya obat serta makanan minuman produk kemasan yang tidak memiliki izin edar resmi

- a. Pengendalian yang sudah ada
 - Belum ada
- b. Pengendalian yang masih dibutuhkan
 - 1) Perencanaan untuk pengawasan dan pembinaan obat dan makanan minuman aman sehat di Kota Medan
 - 2) Mengusulkan anggaran sarana prasarana untuk pembinaan dan pengawasan obat, makanan dan minuman di Kota Medan
 - 3) Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan belum memadai
- c. Rencana Perbaikan

Terkait pengendalian yang masih dibutuhkan maka Dinas Kesehatan Kota Medan dalam Tahun 2018 merencanakan untuk melaksanakan perbaikan atas Kegiatan pengendalian tersebut, yaitu:

No	Kegiatan Pengendalian	Penanggung-jawab	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Perencanaan untuk pengawasan dan pembinaan obat dan makanan minuman aman sehat di Kota Medan	Kasi Farmasi	Tahun 2018	Laporan hasil pengawasan obat , makanan dan minuman

2.	Mengusulkan anggaran sarana prasarana untuk pembinaan dan pengawasan obat, makanan dan minuman di Kota Medan	Kasi Farmasi	Tahun 2018	DPA
3.	Pengadaan Sarana dan prasarana pengawasan belum memadai	Kasi Farmasi	Tahun 2019	Sarana dan prasarana pengawasan

4. Tidak terpenuhinya standar peralatan kesehatan di puskesmas

- a. Pengendalian yang sudah ada
 - 1) Perencanaan anggaran pengadaan alat kesehatan
- b. Efektifitas Pengendalian yang ada
 - Efektifit
- c. Pengendalian yang masih dibutuhkan
 - 1) Perencanaan anggaran pengadaan alat kesehatan
- d. Rencana Perbaikan

Terkait pengendalian yang masih dibutuhkan maka Dinas Kesehatan Kota dalam Tahun 2018 merencanakan untuk melaksanakan perbaikan atas Kegiatan pengendalian tersebut, yaitu:

No	Kegiatan Pengendalian	Penanggung - jawab	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Perencanaan anggaran pengadaan alat kesehatan	Kasi Alkes dan PKRT	Tahun 2018	Anggaran pengadaan alat kesehatan

5. Tidak semua alat kesehatan terkalibrasi setiap tahunnya

- a. Pengendalian yang sudah ada
 - 1) Perencanaan anggaran kegiatan kalibrasi
 - 2) Pengadaan alat untuk alat pengganti dari alat yang tidak sesuai lagi standar ukurnya (tidak terkalibrasi)
- b. Efektifitas Pengendalian yang ada
 - Efektif
- c. Pengendalian yang masih dibutuhkan
 - 1) Perencanaan anggaran kegiatan kalibrasi

- 2) Perencanaan anggaran pemeliharaan untuk alat yang tidak terkalibrasi karena rusak
 - 3) Pengadaan alat untuk alat pengganti dari alat yang tidak sesuai lagi standar ukurnya (tidak terkalibrasi)
- d. Rencana Perbaikan
- Terkait pengendalian yang masih dibutuhkan maka Dinas Kesehatan Kota Medan dalam tahun 2018 merencanakan untuk melaksanakan perbaikan atas kegiatan pengendalian tersebut, yaitu:

No	Kegiatan Pengendalian	Penanggung-jawab	Waktu Pelaksanaan	Output
1	Perencanaan anggaran kegiatan kalibrasi	Kasi Alkes dan PKRT	Tahun 2018	DPA
2	Perencanaan anggaran pemeliharaan untuk alat yang tidak terkalibrasi karena rusak	Kasi Alkes dan PKRT	Tahun 2018	DPA
3	Pengadaan alat untuk alat pengganti dari alat yang tidak sesuai lagi standar ukurnya (tidak terkalibrasi)	Kasi Alkes dan PKRT	Tahun 2019	Alat kesehatan

6. Kurangnya diklat SDM/ penanggung jawab program Surveilans

- a. Pengendalian yang sudah ada

Terkait dengan risiko Kurangnya diklat SDM/ penanggung jawab program Surveilans Dinas Kesehatan Kota Medan sudah memiliki pengendalian berupa:

 - 1) Anggaran sosialisasi
 - 2) Anggaran pelatihan
- b. EfektifitasPengendalianyangada
Efektifit
- c. Pengendalian yang masih dibutuhkan
 - 1) Perencanaan Pelatihan petugas Surveilans
 - 2) Mengusulkan penambahan SDM Surveilans
 - 3) Mengusulkan anggaran sosialisasi
 - 4) Melengkapi data
- d. Rencana Perbaikan

Terkait pengendalian yang masih dibutuhkan maka Dinas Kesehatan Kota dalam Tahun 2018 merencanakan untuk melaksanakan perbaikan atas kegiatan pengendalian tersebut, yaitu:

No	Kegiatan Pengendalian	Penanggung-jawab	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Perencanaan Pelatihan	Kasi Surveilans, Imunisasi dan Haji	Tahun 2018	DPA
2.	Mengusulkan anggaran penambahan SDM	Kasi Surveilans, Imunisasi dan Haji	Tahun 2018	DPA
3.	Mengusulkan anggaran sosialisasi	Kasi Surveilans, Imunisasi dan Haji	Tahun 2018	DPA
4.	Melengkapi data	Kasi Surveilans, Imunisasi dan Haji	Tahun 2018	Data surveilans

7. Setelah diberikan PMT selama 90 hari tidak berkelanjutan pemberian makanan di keluarga

- a. Pengendalian yang sudah ada
Terkait dengan risiko setelah diberikan PMT selama 90 hari tidak berkelanjutan pemberian makanan di keluarga Dinas Kesehatan Kota Medan sudah memiliki pengendalian berupa PPG (Pusat Pemulihan Gizi)
- b. Efektifitas Pengendalian yang ada
Efektif
- c. Pengendalian yang masih dibutuhkan
 - 1) Meningkatkan peran lintas sektor
 - 2) Sosialisasi tatalaksana Gizi buruk dan Gizi kurang
- d. Rencana Perbaikan
Terkait pengendalian yang masih dibutuhkan maka Dinas Kesehatan Kota dalam tahun 2018 merencanakan untuk melaksanakan perbaikan atas kegiatan pengendalian tersebut, yaitu:

No	Kegiatan Pengendalian	Penanggung-jawab	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Meningkatkan peran lintas sektor	Kasie Kesga dan Gizi	Tahun 2018	Meningkatnya peran lintas sektor

2	Sosialisasi tatalaksana Gizi buruk dan Gizi kurang	Kasie Kesga dan Gizi	Tahun 2019	Terlaksananya sosialisasi
---	--	----------------------	------------	---------------------------

8. Terbatasnya jumlah mikroskop yang baik dan bahan habis pakai diluar dropping dari pusat pada setiap layanan

- a. Pengendalian yang sudah ada

Terkait dengan risiko terbatasnya jumlah mikroskop yang baik dan bahan habis pakai diluar dropping dari pusat pada setiap layanan, Dinas Kesehatan Kota Medan sudah memiliki pengendalian sebagai berikut:

 - 1) Anggaran pengadaan mikroskop dan bahan habis pakai lab diluar dropping dari pusat
 - 2) Anggaran perawatan / service mikroskop
- b. Efektifitas Pengendalian yang ada

Kurang efektif
- c. Pengendalian yang masih dibutuhkan
 - 1) Peningkatan anggaran pengadaan mikroskop dan bahan habis pakai lab diluar dropping dari pusat
 - 2) Peningkatan anggaran pemeliharaan / service mikroskop
- d. Rencana Perbaikan

Terkait pengendalian yang masih dibutuhkan maka Dinas Kesehatan Kota Medan dalam Tahun 2018 merencanakan untuk melaksanakan perbaikan atas Kegiatan pengendalian tersebut, yaitu :

No	Kegiatan Pengendalian	Penanggung-jawab	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Usulan Peningkatan anggaran pengadaan mikroskop dan bahan habis pakai lab diluar dropping dari pusat	Kasi P2PM	Tahun 2018	Anggaran mikroskop yang meningkat
2.	Usulan Peningkatan anggaran pemeliharaan / service mikroskop	Kasi P2PM	Tahun 2018	Anggaran mikroskop yang meningkat

9. Penderita sering menghentikan sendiri pengobatan sebelum waktunya berhenti

- a. Pengendalian yang sudah ada

Terkait dengan risiko Penderita sering menghentikan sendiri pengobatan sebelum waktunya berhenti Dinas Kesehatan Kota Medan memiliki pengendalian berupa Pelacakan penderita mangkir melalui media komunikasi

- b. Efektifitas Pengendalian yang ada Efektif
- c. Pengendalian yang masih dibutuhkan
 - 1) Komunikasi antar petugas, PMO, kader, wasor terus dilaksanakan
 - 2) Anggaran transport kader untuk pelacakan penderita TBC mangkir
- d. Rencana Perbaikan
 Terkait pengendalian penderita sering menghentikan sendiri pengobatan sebelum waktunya berhenti Dinas Kesehatan Kota dalam tahun 2018 merencanakan untuk melaksanakan perbaikan atas kegiatan pengendalian tersebut, yaitu:

No	Kegiatan Pengendalian	Penanggun-jawab	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Komunikasi antar petugas, PMO, kader, wasor terus dilaksanakan	Kasie P2PM	Tahun 2018	Terlaksananya komunikasi antara petugas , PMO, kader dan wasor
2.	Usulan anggaran transport kader untuk pelacakan penderita TBC mangkir	Kasie P2PM	Tahun 2018	Tersedianya anggaran transport kader

10. Kondisi jumlah kepesertaan JKN PBI yang berubah-ubah setiap bulan (tidak tetap)

- a. Pengendalian yang sudah ada
 Terkait dengan risiko Kondisi jumlah kepesertaan JKN PBI yang berubah-ubah setiap bulan (tidak tetap) Dinas Kesehatan Kota Medan memiliki pengendalian berupa :
 - 1) Membuat SOP validasi data pasien yang akan di klaim
 - 2) (belum ada)
- b. Efektifitas Pengendalian yang ada Efektif
- c. Pengendalian yang masih dibutuhkan
 - 1) Membuat SOP validasi data pasien yang akan di klaim
 - 2) Persyaratan anggota tim validasi kepesertaan di Dinas Kesehatan

- d. Rencana Perbaikan
Terkait pengendalian Kondisi jumlah kepesertaan JKN PBI yang berubah-ubah setiap bulan (tidak tetap) Dinas Kesehatan Kota dalam Tahun 2018 merencanakan untuk melaksanakan perbaikan atas kegiatan pengendalian tersebut, yaitu:

No	Kegiatan Pengendalian	Penanggung-jawab	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Membuat SOP validasi data pasien yang akan di klaim	Kasi Yankes primer	Tahun 2018	SOP validasi data pasien
2.	Menyusun kriteria persyaratan anggota tim validasi kepesertaan di Dinas Kesehatan	Kasi Yankes primer	Tahun 2018	Adanya kriteria baku Persyaratan anggota tim validasi

11. Syarat pengajuan klaim dari RS Provider sering tidak lengkap

- a. Pengendalian yang sudah ada
Terkait dengan risiko Syarat pengajuan klaim dari RS Provider sering tidak lengkap Dinas Kesehatan Kota Medan memiliki pengendalian berupa Pembentukan tim verifikator Independen dan Verifikator Internal Dinas Kesehatan
- b. Efektifitas Pengendalian yang ada
Belum Efektif
- c. Pengendalian yang masih dibutuhkan
Pembentukan tim verifikator Independen dan Verifikator Internal Dinas Kesehatan membuat SOP validasi data pasien yang akan di klaim
- d. Rencana Perbaikan
Terkait pengendalian syarat pengajuan klaim dari RS Provider sering tidak lengkap Dinas Kesehatan Kota dalam tahun 2018 merencanakan untuk melaksanakan perbaikan atas kegiatan pengendalian tersebut,yaitu:

No	Kegiatan Pengendalian	Penanggung-jawab	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Pembentukan tim verifikator Independen dan Verifikator Internal Dinas Kesehatan	Kabid yankes	Tahun 2018	Tim Verifikator
2	Usulan anggaran verifikator independen	Kabid yankes	Tahun 2018	DPA

12. Jumlah kapitasi di Puskesmas yang tidak tetap

- a. Pengendalian yang sudah ada

Terkait dengan risiko Jumlah kapitasi di Puskesmas yang tidak tetap Dinas Kesehatan Kota Medan belum memiliki pengendalian
- b. Pengendalian yang masih dibutuhkan
 - 1) Penghitungan poin JKN lebih terukur
- c. Rencana Perbaikan

Terkait pengendalian Jumlah kapitasi di Puskesmas yang tidak tetap Dinas Kesehatan Kota dalam tahun 2018 merencanakan untuk melaksanakan perbaikan atas kegiatan pengendalian tersebut, yaitu:

No	Kegiatan Pengendalian	Penanggung-jawab	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	penghitungan poin JKN lebih terukur	Kasi yankes primer	Tahun 2018	Poin JKN yang valid

13. Keterbatasan PAGU Anggaran Daerah

- a. Pengendalian yang sudah ada

Terkait dengan risiko Keterbatasan PAGU Anggaran Daerah Dinas Kesehatan Kota Medan belum memiliki pengendalian
- b. Pengendalian yang masih dibutuhkan
 - 1) Penambahan PAGU Anggaran Daerah untuk Dinas Kesehatan diluar Anggaran JKN
- c. Rencana Perbaikan

Terkait pengendalian Keterbatasan PAGU Anggaran Daerah Dinas Kesehatan Kota dalam tahun 2018 merencanakan

untuk melaksanakan perbaikan atas kegiatan pengendalian tersebut, yaitu:

No	Kegiatan Pengendalian	Penanggung-jawab	Waktu Pelaksanaan	Output
1.	Usulan penambahan PAGU Anggaran Daerah untuk Dinas Kesehatan diluar Anggaran JKN	Kepala Dinas	Tahun 2018	Pagu anggaran Bertambah

6. Informasi dan Komunikasi

Rencana Tindak Pengendalian dan penyusunan serta perbaikan kegiatan pengendalian tahun 2018 yang telah disusun ini diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Bentuk sarana komunikasi yang akan dilakukan untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan rencana tindak pengendalian kepada pihak-pihak terkait, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Informasi	Bentuk/Sara	Ditujuka	Waktu Pelaksanaan
1	DPA Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Medan	Surat / email	Kepala Bidang	April 2018
2	PERWAL JAMPERSAL	Surat	Kepala Puskesmas	Agustus 2018
3	SiTT	Pelatihan	Petugas TB Puskesmas	Juni 2018
4	eTB Manager	Sosialisasi	Petugas TB Puskesmas	Juli 2018

7. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggungjawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kegiatan pengendalian dan SOP yang dibuat dapat menyelesaikan permasalahan - permasalahan dan mengatasi risiko-risiko yang ada, maka harus dilakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi dan efektifitas kegiatan pengendalian dan SOP yang dibuat dalam mengatasi risiko-risiko yang ada.

Rencana monitoring dan evaluasi terkait implementasi dan efektifitas kegiatan pengendalian dan SOP yang dibuat dalam rangka

menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Pengendalian	Pemantauan		
		Bentuk Pemantauan	Dilakukan oleh	Waktu Pelaksanaan
1	Ketersediaan obat yang ada belum optimal	Supervisi	Kasi Farmasi	Tahun2018
2	Tempat Penyimpanan Obat Belum Memadai	Supervisi	Kasi Farmasi	Tahun2018
3	Banyaknya obat serta makanan minuman produk kemasan yang tidak memiliki izin edar resmi	Supervisi	Kasi Farmasi	Tahun2018
4	Tidak terpenuhinya standar peralatan kesehatan di puskesmas	Supervisi	Kasi Alkes PKRT	Tahun2018
5	Tidak semua alat kesehatan terkalibrasi setiap tahunnya	Supervisi	Kasi Alkes PKRT	Tahun2018
6	Kurangnya diklat SDM/ penanggung jawab program Surveilans	Supervisi	Kasi Surveilans, Imunisasi dan Haji	Tahun2018
7	Setelah diberikan PMT selama 90 hari tidak berkelanjutan pemberian makanan tambahan di keluarga	Supervisi Laporan	Ka.UPT	Tahun2018
8	Terbatasnya jumlah mikroskop yang baik dan bahan habis pakai diluar dropping dari pusat pada setiap layanan	Supervisi Laporan	Kasi P2PM	Tahun2018
9	Penderita sering menghentikan sendiri pengobatan sebelum waktunya berhenti	Supervisi Laporan	Ka.UPT	Tahun2018
10	Kondisi jumlah kepesertaan JKN PBI yang berubah-ubah setiap bulan (tidak tetap)	Supervisi	Kasi Yankes Primer	Tahun2018
11	Syarat pengajuan klaim dari RS Provider sering tidak lengkap	Supervisi Berkas klaim	Kasi Yankes Primer	Tahun2018
12	Jumlah kapitasi di Puskesmas yang tidak tetap	Koordinasi dengan BPJS	Kasi Yankes Primer	Tahun2018
13	Keterbatasan PAGU Anggaran Daerah	Advokasi	Kepala Dinas	Tahun2018

Pada akhir Tahun 2018 pelaksanaan SPIP dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan yang tertuang dalam rencana tindak pengendalian ini akan dievaluasi lebih lanjut. Hasil evaluasi atas pelaksanaan perbaikan kebijakan dan prosedur, pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang diperbaiki akan digunakan sebagai dasar untuk penandatanganan **Statement of Responsibility**.